MENGENAL DARI DEKAT:
ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

*Muhammad Azhar**

I. Pendahuluan

Paling tidak, ada *lima* hal yang mendorong penulis untuk memilih topik di atas dalam uraian artikel ini. *Pertama,* dibanding dengan semakin maraknya studi *tokoh* dan *pemikiran* dalam kajian Islam akhir-akhir ini, maka studi *pergerakan* boleh dikatakan masih cukup langka, lebih-lebih bila dilihat dari upaya penulisan dari kalangan internal umat Islam Indonesia. Studi pergerakan Islam dewasa ini masih banyak dihasilkan oleh penulis luar negeri sebagaimana terlihat dalam berbagai buku terjemahan di berbagai tempat penerbitan maupun penjualan buku.

Kedua, mengingat umat Islam Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia, merupakan suatu hal yang naif bila mereka tidak mengenal lebih jauh seluk beluk perjalanan dan pertumbuhan (perkembangan) Organisasi Konferensi Islam (OKI) dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat aktif dalam berbagai pertemuan organisasi Islam internasional tersebut, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dunia Islam di belahan bumi lainnya tapi juga sangat dirasakan keberadaannya oleh bangsa Indonesia sendiri khususnya umat Islam.

Ketiga, dalam era globalisasi dan informasi dewasa ini, bukan zamannya lagi bila umat Islam Indonesia bersikap isolatip terhadap berbagai perkembangan dunia internasional terutama yang berkaitan dengan perkembangan dunia Islam. Inklusivitas dan pluralitas keberagamaan umat Islam dunia sedikit banyaknya amat dipengaruhi oleh sejauhmana informasi yang diperoleh tentang "keadaan" umat Islam itu sendiri, baik secara geografis, organisatoris maupun aspek akademis lainnya.

Keempat, mengingat trend *the revival of Islam"* (kebangkitan Islam) kini tengah

***Drs. Muhammad Azhar, MA.**, Kepala LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam) UMY, Kandidat Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

melanda di sebagian besar penjuru dunia baik secara kultural maupun institusional, tentunya merupakan suatu keharusan pula bagi umat Islam untuk mengenal lebih jauh variabel-variabel yang turut mengiringi sekaligus mendorong fenomena kebangkitan tersebut, yang secara struktural-institusional OKI (Organisasi Konferensi Islam) banyak ikut terlibat di dalamnya.

Kelima, OKI itu sendiri merupakan satu-satunya organisasi "antar pemerintah" yang dimiliki oleh umat (dunia) Islam, yang dalam keadaan yang sama tidak dimiliki oleh penganut agama lain. Boleh jadi ini merupakan "khas" agama Islam yang sangat menekankan adanya ukhuwah Islamiyah di antara sesama mereka, yang manfaat dan implikasi dari semangat ukhuwah itu tidak hanya untuk umat (dunia) Islam *an-sich* tapi juga untuk masa depan peradaban dunia secara keseluruhan.

II. Latar Belakang Berdirinya OKI

Secara historis, jauh sebelum terbentuknya OKI, beberapa *negara Islam* atau yang memiliki penduduk *mayoritas* Muslim telah beberapa kali mengadakan pertemuan internasional (konferensi) dalam rangka untuk membahas berbagai persoalan yang menimpa dunia Islam.

Konferensi I Dunia Islam (pra-OKI) diadakan di Kairo pada bulan Mei 1926, yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia Belanda (kini; Indonesia), Johor (Malaysia) British India, Yaman, Hijaz, Palestina, Irak dan Polandia. *Karena sebagian besar dunia Islam masih berada di bawah kekuasaan kolonial,* maka utusan-utusan ini *tidak mewakili negara,* tetapi hanya sebagai perorangan saja. Pada waktu itu *tidak hadir* utusan dari Turki, Persia, Afghanistan, Nejd dan Rusia. Karena utusan-utusan dalam konferensi ini bukan dari utusan pemerintah, maka *diputuskan* bahwa sangat diperlukan semua utusan kaum muslimin dapat hadir dalam suatu pertemuan, yang diadakan di suatu negara yang dipilih oleh umat Islam, sehingga umat Islam mendapat kesempatan untuk membahas kemungkinan *menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan* sesuai dengan syari'ah *(Islamic Law).*

Konferensi juga menghimbau semua umat Islam agar tidak henti-hentinya membicarakan masalah kekhalifahan ini, yang dianggap sebagai roh dan penjelmaan Islam. Konferensi juga menekankan agar umat Islam bekerjasama untuk mewujudkan lembaga kekhalifahan ini. Namun himbauan ini tidak memberikan hasil apapun, sehingga *tidak ada lagi konferensi yang membahas mengenai lembaga kekhalifahan ini.*

Pertemuan Kedua, pemimpin-pemimpin Islam dari berbagai belahan dunia Islam yang diadakan di Mekah pada bulan juni 1926 disponsori pemimpin baru Jazirah Arab Abdul Aziz Ibn Su'ud (wafat 1973), namun konferensi ini *mendapat kecaman* keras dari Pemerintah Turki apabila ditampilkan masalah kekhalifahan. Oleh karena itu masalah kekhalifahan ini tidak diungkit lagi dalam konferensi ini. Konferensi hanya me-

musatkan perhatian tentang *masa depan Hijaz* khususnya mengenai Haramain (Mekah dan Madinah), dan bagaimana cara penyelenggaraan *haji.* Ibnu Su'ud ketika itu merebut kota Mekah dan Madinah dari Syarif Husein. Dalam konferensi tersebut para pemimpin Islam *mempercayakan pengurusan Haramain* yang berhubungan dengan ibadah Haji. Di samping itu dibentuk suatu institusi yang permanen yang disebut dengan *Mu'tamar al A'lam al-Islamy*, dan diputuskan bahwa organisasi ini mengadakan *pertemuan tahunan* di Mekah bersamaan dengan musim haji, walaupun dalam kenyataannya, pertemuan tersebut tidak dapat diadakan tiap-tiap tahun.

Konferensi selanjutnya yang dihadiri oleh utusan umat Islam sedunia diadakan di *Jerusalem* pada tahun 1931. Mufti Jerusalem, Amin al-Husaini (wafat 1975), pemimpin khalifah India, dan beberapa pemimpin Islam lainnya mengajak konferensi menanggapi keputusan mandat yang berhubungan dengan Dinding Barat Masjid al-Aqsha *(Haith al-Mabka)*, dan tanggapan terhadap *rencana Zionis menguasai Palestina* secara umum. Konferensi ini rupanya dianggap sebagai ancaman terhadap *ide negara sekuler*, karena itu pemikiran-pemikiran dalam konferensi itu mendapat tantangan dari beberapa pemimpin. Penganut sekularisasi di Mesir menyatakan bahwa anti sekularisasi itu berlawanan dengan evolusi modern yang menuju kepada terbentuknya *negara nasional.* Sedangkan Turki secara resmi menyatakan apa yang dikemukakan konferensi ini tidak ada nilainya sama sekali yang mencoba *mempergunakan agama di dalam politik.* Inggeris sebagai pemegang mandat di Palestina memperingatkan kepada penyelenggara agar tidak membicarakan masalah-masalah internal atau eksternal dari negara- negara sahabatnya di beberapa belahan dunia Islam, yang waktu itu umumnya sebagai penjajah. Di kalangan pemimpin agama, yaitu dari utusan al-Azhar menentang pemikiran penyelenggara yang ingin mendirikan suatu *Universitas Islam* di Jerusalem. Walikota Muslim di Jerusalem ditentang sebab adanya partisipasi Mufti, padahal mereka berdua bermusuhan secara pribadi. Akhirnya tantangan berat datangnya dari tekanan Zionisme. Semua faktor-faktor ini menyebabkan utusan-utusan pemerintah merasa kecewa untuk menghadiri konferensi. Bahkan Ibnu Su'ud sendiri, yang bertanggungjawab mengadakan pertemuan di Mekah mengirimkan delegasi agak terlambat.

Walaupun banyak masalah-masalah ini, kemajuan konferensi hanya mengalami sedikit saja kesulitan. Menghadapi instruksi-instruksi pemerintahan Inggeris di Palestina, konferensi mengajukan *protes,* menentang sistem mandat dan menentang kebijaksanaan Perancis di Afrika Utara, *anti kebijaksanaan Islam* yang dilakukan pemerintah Soviet di Asia Tengah, dan kegiatan-kegiatan Italia di Libya. Utusan partai Wafd dari Mesir diusir dari Palestina oleh penguasa Inggeris, karena kritik-kritik mereka yang tajam terhadap kekuasaan kolonial di negari-negeri Islam. Namun konferensi berhasil mem-

bentuk suatu *dewan eksekutif Mu'tamar* yang terdiri dari 25 anggota, termasuk 3 orang dari Mesir, 4 dari India, 4 dari Afrika Barat Daya, 1 dari Persia, 1 dari Jawa (Indonesia), 1 dari Turki yang tinggal di Warsawa, 1 dari Bosnia, dan 10 dari Arab Palestina, Syiria, Irak dan Arabia. Salah seorang *offisial* dari Persia, Sayyid Ziyauddin Thabataba'i, dipilih sebagai *sekretaris jenderal*. Salah satu hasil nyata dari Mu'tamar ini adalah keberhasilan mereka mengakhiri *perang antara Saudi Arabia dan Yaman*, tahun 1934. Kemudian sesudah itu tidak ada lagi hal-hal yang dapat dicatat, karena dalam Perang Dunia Kedua, *kegiatan-kegiatan mu'tamar terhenti* sama sekali.

Kendatipun di dalam konferensi Jerusalem sudah diputuskan bahwa Mu'tamar akan bertemu tiap-tiap dua tahun, namun tidak sekalipun konferensi dapat diadakan sampai tahun 1949. Sejumlah faktor-faktor yang *dapat disumbangkan bagi kebangkitan Islam* adalah; tercapainya kemerdekaan di negara-negara yang sebahagian besar rakyatnya beragama Islam, dan untuk selanjutnya mendambakan adanya persatuan umat Islam.[1]

Akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an adanya *usaha-usaha menyatukan dasar politik bagi negara-negara Muslim di PBB*. Maka muncullah *blok Islam* yang berbeda dengan blok Barat dan blok Komunis. *Dua masalah* yang mendasar yang disumbangkan bagi kegiatan-kegiatan yang sama adalah: *pertama,* masih banyak negara-negara yang penduduknya beragama Islam belum mencapai kemerdekaan. *Kedua,* pembentukan negara Israel yang didukung oleh *Super Power*.

Salah satu langkah penting menuju persatuan umat Islam *sesudah perang* adalah bangkitnya kembali kegiatan-kegiatan *Mu'tamar al-'Aslam al-Islamy*. Suatu *konferensi Mu'tamar* diadakan di Karachi pada tahun 1949. Kemudian diikuti *konferensi lainnya* pada tahun 1951 di kota yang sama. *Sejumlah proyek* yang berhubungan dengan perdagangan, pendidikan dan sosial dirumuskan di dalam konferensi ini. Diusulkan juga pembentukan *Bulan Sabit Merah* untuk melakukan pertolongan bagi para penderita di negara-negara Muslim, mendirikan suatu lembaga yang mengurus *pendidikan*, sehingga dengan demikian dapat diadakan penukaran guru besar dan sebagainya, serta bantuan-bantuan terhadap *penelitian*. Di samping juga direncanakan *seminar-seminar* yang berkenaan dengan studi Islam yang ditinjau dari segala aspeknya.

Banyak usaha-usaha lain yang diadakan oleh Mu'tamar antara lain Konferensi Internasional mengenai *Ekonomi Islam* yang diadakan di Karachi pada tahun 1949. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperkuat kerja sama di kalangan negara-negara Muslim dalam bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan, dan pembangunan umum lainnya di dunia Islam. Kemudian diikuti dengan konferensi Islam internasional yang kedua diadakan di Teheran tahun 1950.

Konferensi kedua ini mengeluarkan rekomendasi dengan membentuk suatu *sekretariat permanen* untuk menangani pekerjaan yang meliputi:

1. Koleksi, kompilasi, analisis dan menyebarluaskan statistik yang berkenan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.
2. Mempersiapkan buku Statistik tiap-tiap tahun.
3. Melakukan penelitian terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi yang telah dicapai oleh beberapa negara.
4. Penelitian mengenai masalah-masalah ekonomi di beberapa negara.
5. Membantu kepada tiap-tiap negara dalam mempersiapkan rencana-rencana pembangunannya.
6. Mempersiapkan *planning* pembangunan regional dengan membantu tenaga ahli bila diperlukan.
7. Membantu lembaga-lembaga teknik, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

Keinginan untuk bekerja sama di kalangan negara-negara Muslim makin bertambah, dan bukan saja di dalam bidang ekonomi dan kebudayaan tetapi juga dalam *pembangunan intelektual.*[2]

Walaupun semangat sudah berkobar-kobar, namun pemikiran-pemikiran persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim *gagal* menghasilkan sesuatu yang praktis dan positif. Tidak ada konferensi dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang pernah dilontarkan oleh Mufti Besar Jerusalem Amin al-Husaini. *Bahkan Mu'tamar al-'Alam Islamy tidak pernah bertemu sampai tahun 1962.* Yang menjadi *pertanyaan besar* kenapa ide persatuan umat Islam ini tidak segera dilaksanakan, padahal banyak negara-negara Muslim sudah mencapai kemerdekaannya.[3]

Permulaan tahun 1960-an *mulai ada* keinginan untuk kegiatan-kegiatan *persatuan umat Islam. Mu'tamar al-Alam -Islamy* mengadakan konferensinya yang *kelima* dan *keenam*, masing-masing pada tahun1962 di Baghdad dan tahun 1964 di Mogadishu. Pada waktu itu *Rabithah al-'Alam al-Islamy didirikan* yang relatif lebih berhasil dari *Mu'tamar al-'Alam Islamy.*

Menghadapi *tantangan Nasionalisme Arab* yang dikumandangkan oleh Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser, maka Putra Mahkota Faisal dari Saudi Arabia memprakarsai kesatuan umat Islam berdasarkan dengan *konsep ummah,* yang dianggap sebagai perlawanan terhadap radikalisme Nasser dan *sosialisme* yang revolusioner. Oleh karena itu Faisal mengharapkan *agar Islam dijadikan sebagai ideologi tandingan bagi sosialisme dan radikalisme Nasser.* Pemerintah Saudi Arabia menyelenggarakan suatu *Konferensi Islam Internasional* pada bulan Mei 1962 di Mekah untuk membahas cara untuk menghadapi *sekularisme* di dunia Arab dan dunia Islam. Konferensi ini dihadiri baik utusan-utusan pemerintah maupun utusan-utusan non-pemerintah dari negara-negara Muslim. Kendatipun konferensi ini *tidak begitu mendapat dukungan* dari negara-negara Muslim, namun banyak utusan-utusan pemerintah yang ikut dalam konferensi ini, dibanding-

kan dengan keikutsertaan mereka di dalam konferensi yang diadakan oleh *Mu'tamar al-'Alam Islamy. Konferensi inilah yang mendirikan Rabithah al-'Alam Islamy*, di mana tujuannya yang utama adalah kegiatan-kegiatan missi Islam.

Kalau program kegiatan missi Islam semata tidak begitu mensukseskan bagi Faisal, karena tujuan utamanya lebih dari itu. Faisal pada tahun 1964 menjadi Raja Saudi Arabia. Dia melanjutkan usahanya untuk menjadikan kerajaannya berdasarkan pada *identitas Islam* sebagai lawan dari kelompok *nasionalis* dan pemikiran-pemikiran *sekuler*. Oleh karena itu Raja Faisal berkunjung ke Iran, Jordania, Sudan, Turki, Pakistan, Maroko, Guinea, Mali dan Tunisia selama pertengahan tahun-tahun 1960-an, *untuk mempopulerkan kaum muslimin di bawah satu atap*. Dia mengajak agar diadakan konferensi tingkat tinggi negara-negara Muslim untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Walaupun ajakannya ini didukung Somalia, Iran, Maroko, Jordania dan Pakistan, namun dia mendapat *kecaman keras* dari pemerintah Mesir, Damaskus dan Baghdad. Untuk itu Raja Faisal *menunda* usaha-usahanya untuk sementara waktu. Pemimpin-pemimpin politik Islam lainnya, terutama Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdurrahman, dilaporkan juga aktif berusaha untuk tujuan-tujuan yang sama. Walaupun demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Abdurrahman tidak terikat dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja Faisal.

Situasi rupanya *terjadi perubahan* pada negara-negara nasionalis Arab yang terkemuka pada tahun 1067, karena negara-negara tersebut *dikalahkan oleh Israel* dalam Perang Enam Hari. Segera sesudah itu Raja Faisal kembali mengajak negara-negara Muslim untuk bekerjasama, khususnya untuk membebaskan Jerusalem dari pendudukan asing. Raja Faisal mengusulkan agar diadakan suatu *Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Muslim*, tetapi usahanya ini tidak mendapat perhatian. Kekalahan Arab dari Israel tidaklah merupakan angin yang menghancurkan ide-ide nasionalisme Arab dan sekularisme Arab di bawah kepemimpinan Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin-pemimpin sekuler lainnya, walaupun ada sedikit kekurangan popularitasnya, karena itu ide-ide tradisional Muslim, kesatuan umat Islam yang memang sudah ada di dalam sanubari orang-orang Islam di hidupkan kembali.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1969, *dunia Islam dikejutkan* dengan adanya pembakaran Masjidil Aqsha di bawah pendudukan Israel. Mantan Mufti Jerusalem Amin al-Husaini mengirimkan kawat ke semua negara Muslim, dengan harapan agar segera diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi untuk membahas peristiwa yang mengejutkan itu. Negara-negara non-Arab seperti Indonesia, Iran, Pakistan dan Turki secara bersama-sama mengeluarkan suatu *resolusi* di PBB yang mengutuk tindakan Israel itu. Protes berdatangan dari seluruh negara-negara Muslim, dan mendukung di adakannya suatu *KTT Islam. Dengan kejadian itu*

menambah popularitas dan kesadaran ummah. Sebagai hasilnya Jamal Abdel Nasser yang pada masa sebelumnya selalu menantang diadakannya KTT Islam, karena dikhawatirkan akan memecah Gerakan Non Blok, sudah menunjukkan persetujuannya untuk KTT Islam itu. Dalam *sidang darurat Liga Arab* diusulkan agar Saudi Arabia atau Maroko memprakarsai KTT itu. Dengan demikian *pemerintahan Muslim sudah melibatkan diri* ke dalam suatu ide tradisional yang sebelumnya dianggap tidak berharga oleh para intelektual Muslim yang berpendidikan Arab.[4]

Rangkaian peristiwa pertemuan konferensi Islam Internasional sampai kepada peristiwa pembakaran Masjidil Aqsha tersebut merupakan akumulasi dari *background* berdirinya OKI di kemudian hari. Pada **KTT I** tanggal 22-25 September 1969 di Rabat (Maroko) sebanyak 24 negara Muslim sepakat untuk saling tukar pandangan, menjalin pengertian dan bekerja sama yang erat dalam bidang ekonomi, iptek, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya. KTT tersebut juga memutuskan agar pada tahun berikutnya diadakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) guna membahas berbagai hasil KTT serta membentuk suatu *sekretariat* yang permanen sebagai media dalam mempererat kerja sama di antara negara-negara anggota.

Lalu pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) I tanggal 23-25 Maret 1970 di Jeddah, Saudi Arabia diputuskan tempat *kedudukan sekretariat OKI yakni di Jeddah*, dan Tengku Abdurrahman Perdana Menteri Malaysia meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri, kemudian menjadi *Sekretaris Jenderal pertama* untuk OKI. Dan pada KTM III, tanggal 29 Pebruari - 4 Maret 1972 di Jeddah, *piagam* OKI disetujui. Dalam satu pasal dari piagam tersebut lembaga baru ini diberi nama "*Munazhzhomah al-mu'tamaar al-Islamy*" (Bahasa Arab), "*The Organization of the Islamic Conference*" (Bahasa Inggeris) dan "*Oorganization de la Conference islamique*" (Bahasa Perancis). Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal "*Organisasi Konferensi Islam*" *(OKI).*[5]

Berdirinya OKI ini merupakan suatu perkembangan yang cukup berarti bagi kehidupan Islam modern, sebab sesudah berakhirnya institusi kekhalifahan *(the institution of the Caliphate)* tahun 1923 tidak ada lagi institusi politik yang ditaati oleh semua orang Islam.[6]

Adapun *tujuan* dari OKI ini adalah:

1. Untuk mengembangkan kerja sama (solidaritas) Islam di antara negara-negara anggota.
2. Menggalang kerja sama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan kegiatan-kegiatan penting lainnya, juga mengadakan konsultasi di antara para negara anggota di dalam organisasi-organisasi internasional.
3. Berupaya untuk menghapuskan diskriminasi rasial dan menghapus kolonialisme dalam segala bentuknya.
4. Mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional yang berdasarkan keadilan.

5. Menggalang usaha-usaha untuk menjaga tempat-tempat suci dan mendukung perjuangan rakyat Palestina, dan membantu mereka untuk memperoleh kembali hak-hak dan kebebasan tanah air mereka.
6. Memperkuat perjuangan kaum muslimin untuk melindungi martabat, kemerdekaan dan hak-hak nasional mereka.
7. Menciptakan suatu iklim yang layak untuk meningkatkan kerja sama dan pengertian negara-negara anggota dan negara-negara lain.

Dalam piagam OKI juga ditetapkan sejumlah prinsip yang menentukan segala bentuk aktivitas OKI, yakni:

1. Persamaan penuh di kalangan negara-negara anggota
2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, dan tidak campur tangan di dalam masalah-masalah dalam negeri negara-negara anggota.
3. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integrasi teritorial masing-masing negara anggota.
4. Tiap-tiap persengketaan harus diselesaikan secara damai misalnya dengan perundingan, melalui penengah, rekonsiliasi atau arbitrasi.
5. Tidak mempergunakan kekerasan terhadap integritas teritorial, kesatuan nasional dan kemerdekaan politik tiap-tiap negara anggota.[7]

III. Beberapa Aspek Kelembagaan OKI

Secara institusional ada empat komponen besar di dalam tubuh OKI yakni:

A. Konferensi raja-raja dan kepala-kepala pemerintahan dan negara *(Conference of King and Heads of State and Government)*, atau "islamic Summit Conference". Komponen ini selalu disingkat dengan *KTT OKI.*
B. Konferensi para menteri luar negeri (KTM) *(Conference of Foreign Ministers).*
C. Sekretariat Jenderal dan organisasi-organisasi tambahan.
D. Mahkamah Islam Internasional. *(International Islamic Court of Justice).*

Di samping itu *ada sejumlah institusi-institusi* dan organisasi-organisasi yang didirikan di dalam kerangka OKI. Institusi dan organisasi ini dipola untuk bekerja secara independen di dalam sekretariat Jenderal dalam rangka menunjang pencapaian tujuan-tujuannya.

A. Konferensi Raja-raja dan Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan (KTT)

KTT ini merupakan institusi dengan *wewenang tertinggi* di dalam OKI. KTT dapat menjadikan para pemimpin dunia Islam secara periodik untuk meninjau kembali keadaan-keadaan internal dunia Islam dalam segala aspeknya yakni yang menyangkut dengan berbagai *perkembangan politik* ditinjau dari kacamata Islam. KTT merupakan forum tertinggi dimana di dalamnya khusus membahas tentang strategi dan tindakan politik dalam rangka meraih berbagai tujuan yang telah dibakukan secara jelas. Sejauh ini, ada 6 KTT yang telah diselenggarakan, yakni:

a. KTT Islam I di Rabat, *Maroko:* tanggal 22 - 25 September 1969. Melalui KTT ini *OKI didirikan*, dan sampai tahun 1981 konsensus dalam OKI adalah bahwa pertemuan-pertemuan *KTT akan diadakan bila keinginan umat memerlukannya.*
b. KTT Islam II di Lahore, *Pakistan:* tanggal 22-24 Februari 1974. KTT ini dalam rangka *mengkonsolidasi* apa yang telah dicapai oleh sementara anggota pada tahun sebelumnya.
c. KTT Islam III di Mekah, *Saudi Arabia*: tanggal 25-28 Januari 1981 yang melahirkan *Deklarasi Mekah.* KTT ini juga *merupakan peringatan permulaan abad ke-15 Hijriyah.* KTT ini juga mengadakan beberapa *perubahan* di dalam piagam, antara lain KTT diadakan setiap *tiga tahun sekali.*
d. KTT Islam IV di Casablanca, *Maroko:* tanggal 16-19 Januari 1984. Dalam sidang ini *Mesir diterima kembali* menjadi anggota OKI, karena sebelumnya Mesir dikeluarkan dari OKI karena menyetujui perjanjian Camp David dengan Israel.
e. KTT Islam V di *Kuwait:* tanggal 26-29 Januari 1987. Sidang ini dihadiri 46 anggota OKI kecuali Iran dan Libya. Bahasan sidang antara lain soal tentang: Palestina, Perang Iran-Irak, Afghanistan, dan lain-lain.
f. KTT Islam VI tanggal 9-12 Desember 1991 di Dakar, *Senegal.* KTT ini berlangsung di saat usainya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tanggal 9 November 1989. Dan juga pasca perang Teluk dan bersamaan dengan prosel lanjutan perundingan masalah Timur Tengah dan Palestina. Juga dengan berakhirnya perang delapan tahun Iran-Irak (1980-1988). KTT Dakar merupakan KTT OKI yang pertama kali dihadiri mantan presiden Soeharto sebagai pemimpin mayoritas umat Islam terbesar di dunia.[8]

B. Konferensi para Menteri Luar Negeri (KTM)

KTM ini merupakan *pertemuan tahunan* setelah KTT. Para Menteri Luar Negeri OKI turut memikirkan berbagai perkembangan internasional serta pengaruhnya bagi negara-negara Islam dalam rangka untuk mempertahankan berbagai posisi umum dari isu-isu politik dan ekonomi global. Para Menteri Luar Negeri anggota OKI juga memfokuskan perhatian mereka terhadap berbagai isu keislaman yang penting seperti persoalan Palestina, status Jerusalem, konflik Timur Tengah, keadaan Afrika Selatan, Bosnia, dan minoritas Muslim lainnya. Dan berupaya mencari usulan-usulan yang wajar dalam memecahkan masalah-masalah ini.

Para Menteri Luar Negeri juga memperhatikan situasi sosial ekonomi di dunia Islam juga hubungannya dengan negara-negara *bukan* anggota OKI, meneliti berbagai kegiatan lembaga Islam, serta mengadakan kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota, dan menyetujui berbagai rencana kegiatan kerja sama untuk meningkatkan

dan memajukan masyarakat negara-negara anggota.

Konferensi Menteri Luar Negeri juga membicarakan persoalan-persoalan budaya, yang secara khusus memberikan perhatian terhadap berbagai lembaga dan pusat-pusat kebudayaan yang sudah mapan dalam rangka menggalang kerja sama dan proyek peradaban dan kebudayaan Islam serta untuk memenuhi berbagai kebutuhan negeri *minoritas Muslim* di berbagai belahan dunia.[9]

KTM ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang KTT. KTM membuat berbagai keputusan reguler di dalam pertemuan tahunannya. Ada juga *pertemuan luar biasa (extra-ordinary)* dari para Menteri Luar Negeri atas permintaan salah satu anggota atau Sekretariat Jenderal OKI. Walaupun demikian, permintaan ini *harus disetujui dua pertiga anggota.* Persetujuan ini dimintakan melalui surat edaran kepada semua negara anggota. Pasal V dari piagam OKI menjelaskan *kewajiban-kewajiban* dan *fungsi-fungsi* KTM sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dengan kebijaksanaan umum konferensi.
b. Untuk melihat kembali kemajuan-kemajuan di dalam implementasi keputusan-keputusan dari sidang-sidang sebelumnya.
c. Melaksanakan resolusi-resolusi mengenai keinginan bersama yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan konferensi yang tercantum dalam piagam.
d. Untuk membahas laporan komite keuangan dan menyetujui anggaran biaya sekretariat jenderal.
e. Menetapkan tanggal dan tempat konperensi para Menteri Luar Negeri selanjutnya.
f. Membicarakan masalah-masalah yang diajukan oleh satu atau beberapa anggota.
g. Mengangkat Sekretaris Jenderal dan empat orang asisten bagi Sekretaris Jenderal dengan rekomendasi Sekretaris Jenderal.[10]

Berikut ini dicantumkan beberapa catatan tentang KTM negara-negara Islam yang telah diselenggarakan oleh OKI:

1. KTM di Jeddah, *Saudi Arabia*; 23 - 25 Maret 1970.
2. KTM di Karachi, *Pakistan*; 26 - 28 Desember 1970.
3. KTM di Jeddah, *Saudi Arabia*; 29 Februari - 4 Maret 1972.
4. KTM di Baghazi, *Libya*; 24 - 26 Maet 1973.
5. KTM di Kuala Lumpur, *Malaysia;* 21-25 Juni 1974.
6. KTM di Jeddah, *Saudi Arabia,* 12 - 15 Juli 1975 (konferensi ini sebenarnya akan diadakan di *Kairo* pada bulan Mei tahun yang sama, dan Saudi Arabia terpaksa mengambil alih KTM ini ketika Anwar Sadat menarik diri sebagai tuan rumah).[11]
7. KTM di Istanbul, *Turki*; 12-15 Mei 1976.
8. KTM di Tripoli, *Libya*; 11-14 Mei 1977.

9. KTM di Dakar, *Senegal*; 24 - 28 April 1978.
10. KTM di Fez, *Marokko*; 8-12 Mei 1979
11. KTM di *Islamabad*; 17-22 Mei 1980.
12. KTM di Baghdad, *Irak*; 1-5 Juni 1981.
13. KTM di Niamey, *Niger*; 22-26 Agustus 1982.
14. KTM di Dhaka, *Bangladesh*, 6-11 Desember 1983.
15. KTM di San'a, Republik Arab *Yaman*; 18-22 Desember 1984.
16. KTM di Fez, *Marokko*; 6-10 Januari 1986.[12]
17. KTM di Amman, *Jordania*; 21-25 Maret 1987.
18. KTM di Riyadh, *Saudi Arabia*; 13 - 16 Maret 1989.
19. KTM di Kairo, *Mesir*; 31 Juli 1990.
20. KTM di Istanbul, *Turki*; Agustus 1991.
21. KTM di Karachi, *Pakistan*; 25 -30 April 1993.[13]

KTM juga telah mengadakan beberapa *pertemuan khusus (extra ordinary)*:

a. Di Islamabad, *Pakistan*; 27 - 28 Januari 1980 untuk membahas invasi Soviet ke Afghanistan.
b. Di Amman, *Jordania*: 11 - 12 Juli 1980.
c. Di Fez, *Marokko*: 18 - 20 September 1980.
d. Di New York, *AS*: 26 September 1980.
e. Di *Islamabad*: 12 - 13 Juli 1993.
f. Awal Desember 1992 tentang ultimatum batas waktu 15 Januari 1993 untuk menghentikan agresi Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina.

Di samping itu, Menteri-menteri Luar Negeri juga bertemu *setiap tahun di New York* pada saat pertemuan Majlis Umum PBB dengan satu topik untuk memformulasikan suatu pandangan bersama terhadap persoalan-persoalan *agenda Majlis Umum.*

C. Sekretaris Jenderal

Komponen ketiga dari struktur kelembagaan OKI adalah Sekretariat Jenderal yang berkedudukan di *Jeddah*, Saudi Arabia. Di tempat ini juga berpusatnya badan-badan OKI beserta berbagai perwakilan lainnya, begitu pula badan-badan negara Islam lainnya. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih untuk masa jabatan *empat tahun tanpa ada masa perpanjangan*, oleh Konferensi Menteri Luar Negeri (KTM). Tuntutan ini sebagai upaya yang dapat menjamin kelanjutan pelaksanaan berbagai keputusan yang telah disepakati oleh Konferensi Islam. Sekretari Jenderal dibantu oleh *empat asisten* Sekretaris Jenderal serta beberapa pembantu lainnya.[14]

Sekretariat Jenderal merupakan *organ eksekutif* dari OKI, diciptakan *menurut pola sekretariat Jenderal PBB.* Sekretariat Jenderal bertanggungjawab untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk menindak lanjuti resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dari KTT dan KTM.[15]

Adapun *tugas* para *asisten sekretaris Jenderal yakni*:

a. Asisten Sekretaris Jenderal untuk masalah-masalah *politik* juga bertanggungjawab untuk departemen-de-

partemen *minoritas Muslim* dan *informasi* Islam.

b. Asisten Sekretaris Jenderal untuk masalah-masalah *kebudayaan*, dan sosial juga bertanggungjawab bagi *Dana Solidaritas Islam*.
c. Asisten Sekretaris Jenderal untuk masalah-masalah *ekonomi, administrasi* dan *keuangan*.
d. Asisten Jenderal yang bertanggungjawab dalam masalah-masalah *Baitul Maqdis* dan Palestina. Sampai saat ini sudah 6 Sekretaris Jenderal yang memangku jabatan ini, yakni:
   a.1. Tengku Abdulrahman (Malaysia): 1970 - 1973.
   a.2. Hasan Tuhami (Mesir): 1974 - 1975
   a.3. Ahmadou-Karim Gaye (Senegal): 1975 - 1979
   a.4. Habib al-Chatty (Tunisia): 1979 - 1984
   a.5. Syed Syarifuddin Pirzada (Pakistan): 1985 - 1988
   a.6. DR. Hamid Algabid (Nigeria): 1989 - 1993.[16]

D. Mahkamah Internasional

Mahkamah ini merupakan salah satu pilar dan merupakan badan peradilan tertinggi dari OKI. KTT Islam di Thaif tahun 1981 memutuskan untuk membentuk badan peradilan yang sama polanya dengan *International Court of Justice* di *Den Haag*. Wewenang Mahkamah ini meliputi:

1. Semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah ini disetujui oleh anggota-anggotanya, seperti perkara-perkara yang ditetapkan dalam persetujuan-persetujuan dan perjanjian-perjanjian.
2. Membahas pertikaian-pertikaian yang terjadi antar sesama anggota.
3. Perdebatan-perdebatan yang mungkin muncul dalam memahami isi piagam OKI.
4. Memberi fatwa mengenai masalah-masalah hukum atas permintaan Raja atau Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan dan lain-lain.

Mahkamah terdiri dari 11 anggota yang ahli dalam bidang fiqh Islam yang dipilih oleh KTM atas pencalonan negara-negara anggota. Mahkamah ini *berkedudukan di Kuwait*, namun *belum pernah berfungsi*.[17]

Selain keempat komponen besar OKI di atas, dibentuk pula *komite-komite khusus* yang mengkaji soal-soal khusus program OKI, sebagaimana yang dicantumkan pada pembahasan berikut.

IV. KOMITE-KOMITE KHUSUS (Specialized Committees)

Adapun Komite-komite khusus OKI yang telah terbentuk hingga saat ini ialah:

a. Komite al-Quds *(Al-Quds-Jerusalem Committe)*.
   Kominte ini dikenal juga dengan istilah "Komite Jerusalem" yang bertujuan mengkaji dan menindak lanjuti masalah-masalah Jerusalem dan Palestina.
b. Komite Tetap Keuangan *(Permanent Finance Committee)*.
   Semua negara anggota OKI adalah anggota Komite ini *(Committee of the Whole)*. *Tugas* komite ini memper-

siapkan, melakukan dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan Anggaran Sekretariat Jenderal.

c. Komite tetap mengenai soal-soal penerangan dan Kebudayaan *(Standing Committee on Information and Cultural Affairs - COMIAC).*

d. Komite tetap untuk Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *(Standing Committee for Scientific and Technological Coorporation - COMSTECH).*

e. Komite tetap untuk Ekonomi dan Kerjasama Perdagangan *(Standing Committee for Economic and Commercial Coorporation - COMCEC).*

f. Komite Perdamaian Islam *(Islamic Peace Committee).*

g. Komite Islam untuk Urusan Ekonomi, Kebudayaan dan Sosial.

h. Badan Pengawas Keuangan *(Financial Control Organ).*

i. Ad Hoc Committee mengenai Afghanistan.

j. Komite untuk Afrika Selatan dan Namibia.

k. Komite Solidaritas Islam mengenai Rakyat Sahel.

l. Komite 4 pihak mengenai situasi Muslim di Philipina *(Quaripartite Committee on the Situation of the Muslims in Philipinas).*

m. Komite 6 anggota mengenai Palestina *(The Six Member Committee on Palestina).*[18]

Komite ini bisa saja mengalami penambahan atau pengurangan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan OKI dalam mengenai masalah-masalah khusus bagi perjuangan umat Islam sedunia.[19]

V. BADAN-BADAN TAMBAHAN *(Subsidiary Organs)*

1. Dana Solidaritas Islam (*Islam Solidarity fund*-ISF; berkedudukan di Jeddah *Saudi Arabia.*
2. Dana al-Quds *(al-Quds Fund)*; berkedudukan di Jeddah, *Saudi Arabia.*
3. Pusat Penelitian dan Pelatihan ekonomi, Statistik dan Sosial bagi Negara-negara Islam *(the Statistical, Economic and Social Research and Training Center for the Islamic Countries-SESRTCIC)*; berkedudukan di Ankara, *Turki.*
4. Pusat Penelitian Sejarah, Seni dan Kebudayaan Islam (*Research Center for Islamic History, Art and Culture)*; berkedudukan di Istanbul, *Turki.*
5. Pusat Islam bagi Penelitian dan Pelatihan Bidang Kejuruan dan Tehnik *(Islamic Center for Vocational and Technical Training and Research - ICVTTR)*; berkedudukan di Dhaka, *Bangladesh.*
6. Bantuan Dana Islam untuk Iptek & Pembangunan *(Islamic Foundation for Science, Technology and Development - IFSTAD)*; berkedudukan di Jeddah, *Saudi Arabia.*
7. Pusat Islam untuk Pengembangan bidang Perdagangan (Islamic Center for Development of Trade - ICDT), berkedudukan di *Casablanca.*

8. Komisi Bulan Sabit Internasional atau Palang Merah Internasional *(Islamic Commission for the International Cresent-ICIC)*; berkedudukan di *Libya.*
9. Komisi International Pemeliharaan dan Peninggalan Kebudayaan Islam *(International Commission for the Preservation of Islamic Cultural Heritage - ICPIH)*; berkedudukan di Istanbul, *Turki.*
10. Akademi Fiqh Islam *(Islamic Fiqh Academy - IFA)*, berkedudukan di Jeddah, *Saudi Arabia.*
11. Dewan Penerbangan Sipil Islam *(Islamic Civil Aviation Council - ICAC)*; berkedudukan di *Tunisia.*
12. Komisi Hukum Islam International *(The International Islamic Law Commission - IILC)*; berkedudukan di Baghdad, *Irak.* [20]

VI. ORGAN-ORGAN KHUSUS (Specialized Organs)

1. Bank Pengembangan Islam *(Islamic Development Bank - IDB)*; berkedudukan di *Saudi Arabia.*
2. Kantor Berita Islam Internasional *(International Islamic News Agency - IINA)*; berkedudukan di Jeddah, *Saudi Arabia.*
3. Organisasi Penyiaran Negara-negara Islam *(Islamic States Broadcasting Organization - ISBO)*; berkedudukan di *Saudi Arabia.*
4. Kamar Dagang, Industri dan Pertukaran Komoditi Islam *(Islamic Chamber of Commerce, Industry and Commodity Exchange - ICCEC)*; berkedudukan di Karachi, *Pakistan.*
5. Organisasi Ibukota Negara-negara Islam *(Organization of Islamic Capitals)*; berkedudukan di Mekah, *Saudi Arabia.*
6. Asosiasi Maritim Negara-negara Islam *(Islamic Shipowners Association-ISHA)*; berkedudukan di Jeddah, *Saudi Arabia.*
7. Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Islam *(Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO)*; berkedudukan di *Maroko.*
8. Solidaritas Muslim di Bidang Olahraga *(Islamic Solidarity Sport Federation - SIIF)*; berkedudukan di *Saudi Arabia.*
9. Asosiasi Semen Negara-negara Islam *(Islamic Cement Association - ICA)*; berkedudukan di *Turki.*
10. Jaringan Telekomunikasi Negara-negara Islam *(Islamic States Telecomunication Union - ISTU)*; berkedudukan di *Pakistan.*[21]

VII. NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI

Secara politis ada tiga kualifikasi keanggotaan negara-negara OKI; yakni sebagai *anggota (negara Islam), partisipan aktif,* (bukan negara Islam tapi mayoritas Muslim; seperti Indonesia) dan *peserta peninjau*; seperti anggota *Muktamar al-'Alam Islamy, Rabithah al-'Alam Islamy* dan sejenisnya.

Pada awal berdirinya, OKI telah mempunyai 24 negara anggota (1969). Pada tahun 1986 bertambah menjadi 45 negara, dan dewasa ini (1993) anggota OKI berjumlah 51 negara.[22] Dan pada tahun 1994 (bulan Desember) anggota OKI bertambah menjadi 52 negara.

Adapun rincian negara anggota OKI sebagai berikut:

1. Afghanistan
2. Aljazair (Algeria)
3. Bahrain
4. Bangladesh
5. Benin
6. Burkina Faso
7. Brunei Darussalam
8. Camerun
9. Chan
10. Comoros
11. Jobouti
12. Mesir (Egypt)
13. Gabon
14. Gambia
15. Guinea
16. Guniea Bissau
17. Indonesia
18. Iran
19. Irak
20 Jordan
21. Kuwait
22. Libanon
23. Libya
24. Malaysia
25. Maldavis
26. Mali
27. Mauritania
28. Maroko
29. Niger
30. Nigeria
31. Oman
32. Pakistan
33. PLO (Palestina)
34. Qatar.
35. Saudi Arabia
36. Senegal
37. Sierre Leone
38. Somali (Somalia)
40. Syiria
41. Tunisia
42. Turki
43. Uganda
44. Persatuan Emirat Arab (UAE: United Arab Emirates)
45. Yaman[23]

- **Enam Negara OKI anggota baru:**

46. Tanzania
47. Albania
48. Azerbaijan
49. Kirgiztan
50. Turkemenish
51. Tajikistan[24]
52. Mozambiq (masuk 11 Desember 1994)

VIII. Perjalanan OKI dan Perkembangannya Dewasa ini

Perkembangan OKI antara lain dapat dilihat dari segi pertambahan jumlah anggota, ruang lingkup perhatian dan pembahasan masalah, serta perluasan struktural organisasi.

Dari segi keanggotaan, pada tahun 1969 awal mula berdirinya OKI, baru 24 negara terdaftar sebagai anggota dan sampai era 80-an bertambah menjadi 455 = negara (1986). Dan dewasa ini (1993) sudah menjadi 52 negara. Hal ini merupakan indikasi dari adanya peningkatan kualitas, peran dan aktivitas OKI yang relatif muda ini dalam memajukan kerjasama internasional maupun dalam upaya perwujudan tatanan kehidupan dunia yang aman dan damai.

Memang tak dapat dipungkiri, selama ini muncul kesan bahwa OKI ini lebih bersifat "Arabic and Middle East Oriented', dalam pengertian lebih melayani kepentingan Dunia Arab dan Timur Tengah. Kenyataan ini tidak lain disebabkan; *Pertama*, karena kawasan dunia Arab dan Timur Tengah senantiasa menjadi sumber pertikaian internasional, seperti soal Palestina maupun negara Timur Tengah lainnya. *Kedua*, persoalan Palestina dan Timur Tengah memang sangat urgen dan sejalan dengan kepentingan dunia Islam di kawasan lainnya. Ditambah lagi, sebagian besar anggota OKI terdiri dari negara-negara Arab. Walaupun demikian, persoalan kawasan dunia Islam lainnya seperti: Somalia, Bosnia-Herzegovina, Kashmir, Minoritas Muslim di India, Thailand (Pattani) dan Burma (Rohingya) juga di Philipina (Muslim Moro) dan lainnya tetap mendapat tempat dalam setiap agenda pertemuan OKI. Begitu pula persoalan yang dihadapi oleh kaum Muslimin yang berada di wilayah Afrika, Namibia, Afrika Selatan, Afghanistan, Cyprus merupakan bagian yang tak kalah pentingnya dalam sidang-sidang OKI.[25]

Di sisi lain, OKI juga telah memberikan perhatian yang cukup luas dalam bidang pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya, tidak semata-mata politik. Sebagai contoh di bidang ekonomi, pembentukan Dana Konsolidasi Program Pembangunan Dunia Islam sebesar US$ 3 milyar untuk menunjang program-program pembangunan negara-negara anggota OKI, merupakan suatu *"political achievement"* yang sangat menonjol. Pembentukan dana tersebut telah melahirkan "Rencana Aksi untuk memperkuat Kerjasama Ekonomi di antara negara-negara anggota OKI".[26]

OKI juga telah membentuk banyak badan subsider (tambahan) seperti dalam menangani masalah pendidikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, kebudayaan, yang tugasnya hampir menyerupai badan-badan khusus PBB. Di antara badan-badan subsider ini adalah: Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam *(International Commission for the Preservation of Islamic Heritage)*, yang menangani masalah-masalah yang menyangkut pemeliharaan hasil-hasil budaya Islam yang ada di negara-negara Islam; Akademi Fiqh Islam *(Islamic Fiqh Academy)* yang bertujuan mempelajari masalah-masalah yang menyangkut

kehidupan ijtihad yang berasal dari tradisi Islam; Komisi Hukum Islam Internasional *(International Islamic Law Commission)* guna menyumbangkan kemajuan prinsip-prinsip Hukum Islam beserta kodifikasinya; dan lain-lain.[27]

Di samping adanya pandangan yang positif-optimistik di atas, tentunya tidak pula dapat diabaikan beberapa pandangan yang rada 'sinis' terhadap keberadaan OKI. Beberapa pengamat memberikan tanggapannya, antara lain: secara *politis,* diakui bahwa OKI termasuk wadah spesifik, mengingat wadah ini merupakan satu-satunya bentuk organisasi *antar pemerintah* yang didirikan atas dasar agama (Islam), di luar Islam tidak dijumpai hal yang sama. Walaupun demikian, OKI tidaklah bersifat 'anti' Barat atau agama lain, malah ingin senantiasa bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional lainnya. Tetapi timbul pula kesan bahwa OKI cenderung berorientasi kepada Barat atau 'sekuler'. Hingga ada sementara pengamat menyatakan, bahwa salah satu problem terbesar OKI adalah lebih dominannya elite sekuler dalam merumuskan atau menjalankan konsep kenegaraan di masing-masing negara anggota OKI. Secara lebih tegas, OKI mayoritas 'sekuler' atau lebih 'nasionalis' ketimbang 'Islami'. Tentunya pernyataan seperti ini terkesan agak berlebihan.

Dominasi sebagian negara-negara Arab dan timur Tengah terhadap OKI, dimana negara-negara tersebut memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, menyebabkan minimnya upaya untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada untuk kepentingan negara anggota lainnya. Padahal ide pembentukan OKI sampai saat ini masih dinilai sangat positif dan konstruktif, yang pada hakikatnya *potensi* dana maupun tenaga intelektual cukup memadai, namun belum begitu dapat dikembangkann secara lebih riel untuk kepentingan dunia Islam. Egoisme kekuasaan di sebagian negara pendukung OKI terutama di kawasan Timur Tengah masih terlihat dewasa ini. *Firqoh-firqoh* yang bersifat ideologis-politis masih lebih dominan ketimbang tercapainya upaya perwujudan konsep *ukhuwah Islamiyah* antar sesama anggota. Bahkan, dibanding dengan negara-negara lainnya seperti: Jepang, RRC, Singapura yang berfaham 'Budhisme' atau negara-negara Barat yang secara umum berlandaskan pada kerangka etik; 'Kristiani' tampaknya lebih unggul dibanding negara-negara anggota OKI yang mengklaim dirinya bersifat 'Islami'. Walupun ilustrasi seperti ini bukanlah dimaksud untuk menimbulkan adanya sikap saling 'pembedaan' atau 'penentangan', tetapi lebih dimaksudkan sekedar untuk mengadakan studi perbandingan secara positif, dan apresiatif.

Dilihat dari segi *pengambilan keputusan politik,* secara kelembagaan keinginan OKI selalu terbentur dengan 'kepentingan' PBB maupun lembaga atau negara Barat lainnya. Persoalan yang dihadapi OKI dalam menangani masalah-masalah yang menimpa Muslim Kashmir, Afghanistan, Paletina, Bosnia-Herzegovina, Somalia dan lain-lain merupakan salah satu indikasi dari benturan tersebut.[28]

Namun tak dapat pula dipungkiri bahwa ada juga beberapa segi kesuksesan yang diperoleh OKI dalam menangani masalah-masalah yang dihadapinya; misalnya, dalam upaya mewujudkan hasil 'Tripoli Agreement' dalam mengatasi persoalan yang dihadapi kaum muslimin Moro di Philipina Selatan, di mana OKI bertindak sebagai mediator (karena Philipina tidak termasuk OKI). Demikian pula halnya dengan keberadaan negara atau lembaga lain yang termasuk kategori afiliasi (bagian) dari OKI, seperti halnya minorotas Muslim di beberapa negara maupun lembaga-lembaga semacam *Rabithah al-'Alam Islamy*, dan semisalnya.

Dari segi *militer*, OKI dinilai masih terlalu lemah. Memang telah muncul harapan baru, di mana negara-negara anggota OKI telah berhasil *menyepakati* sebuah *ultimatum* terhadap PBB dan Serbia untuk menggunakan militer dalam membela nasib Bosnia, begitu pula tentang perlunya pencabutan embargo di Bosnia oleh PBB. Namun dalam *pelaksanaan*, OKI masih belum mampu menunjukkan kekuatannya. Kasus lain, dimana OKI bermaksud mengirimkan sebanyak 23 ribu pasukan dari berbagai negara anggotanya terutama dari Palestina, Iran dan Turki dalam rangka memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB di Bosnia, ternyata mendapat 'penjegalan' dari negara-negara Barat. Padahal tawaran OKI ini tidak lain hanya untuk melindungi 'daerah-daerah kantong perlindungan' kaum Muslim di Bosnia yang dibentuk PBB dari ancaman pembantaian tentara Serbia. OKI juga pernah bermaksud untuk mengirimkan senjata-senjata dan amunisi yang sangat dibutuhkan kaum pejuang Muslim Bosnia, mengingat, oleh OKI, Barat selama ini dianggap kurang tegas dan bersifat 'mengulur-ngulur' waktu dalam menindak Serbia dengan kekuatan militer. Penjegalan di atas oleh Barat didasarkan pada, paling tidak, dua argumen yang terkesan dibuat-buat; *pertama*, oleh Barat, kehadiran pasukan muslim dalam jumlah besar hanya akan menimbulkan kemarahan Serbia yang pada gilirannya dapat mengancam dan membahayakan pasukan penjaga perdamaian PBB di Eropa. *Kedua*, pengiriman lebih banyak pasukan bersenjata pada dasarnya sama halnya dengan mencabut embargo senjata dan memperbesar eskalasi perang. Padahal bila dilihat besarnya jumlah korban penduduk Muslim Bosnia yang tewas dan luka-luka, maupun yang masih hidup dan terancam perang, argumen Barat tersebut terasa mengada-ada. Sebenarnya negara-negara Barat khawatir bahwa pengerahan pasukan-pasukan Muslim ke Bosnia dalam jumlah besar itu akan merupakan langkah pertama pembentukan 'negara fundamentalis Islam' di jantung Eropa. Apalagi pasukan-pasukan Muslim yang dikirim berasal dari Iran, Palestina dan Turki.

Akibat 'ketidak-berdayaan' OKI tersebut menyebabkan Barat bersikap tidak tegas dan maju-mundur dalam mengambil tindakan militer di Bosnia. Kurangnya solidaritas anggota OKI dalam menentang embargo senjata Dewan Keamanan (DK) PBB dengan mengirimkan senjata-senjata berat dan pasukan-pasukan-

nya untuk menyelamatkan Bosnia-Herzegovina agar tidak hilang dari peta politik.[29]

Secara *ekonomis*, potensi dana OKI sebenarnya sangatlah banyak, namun pada umumnya negara-negara OKI belum memiliki komitmen yang tinggi dalam sistem pengumpulan dana ini. Bahkan sebagian besar negara anggota lebih rajin membayar iuran untuk PBB dibanding OKI. Dana OKI hanya sebanyak 1/2 dari dana OAU *(Organization African Unity)*, jadi masih terlalu minim mengingat masih banyaknya anggota OKI yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar iuran tersebut. Di sisi lain, selama ini sebagian besar program pendanaan OKI lebih banyak didonasi oleh Saudi Arabia, namun menimbulkan kecurigaan di kalangan anggota OKI sendiri dan timbul kesan seolah-olah OKI merupakan proyek 'ambisius' negara tersebut. Sudah saatnya dipertimbangkan agar negara-negara OKI yang tergolong kaya turut memikirkan negara anggota yang masih sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Dan tampaknya, akhir-akhir ini telah muncul semacam kesadaran baru di kalangan negara anggota OKI untuk mengadakan saling kerjasama di bidang ekonomi yang merupakan bagian dari kerangka *(frame)* dialog antara Utara-Selatan maupun Selatan-selatan. Dari aspek ini, oleh para pengamat, badan OKI yang membidangi pendanaan semacam IDB *(Islamic Development Bank)* dinilai semakin maju dan berkembang dalam memberikan bantuan bagi pembangunan negara-negara OKI. [30]

Dari segi *kelembagaan*. Ada beberapa badan OKI yang dinilai belum begitu fungsional, diantaranya: Mahkamah Islam Internasioal yang berkedudukan di Kuwait, Juga Palang Merahnya OKI atau Bulan Sabit OKI *(Islamic Commission for the International Crescent)* kini masih vacum karena kekurangan dukungan dana. Badan strategis OKI lainnya yang masih lamban yakni IINA *(International Islamic News Agency)* atau semacam Kantor Berita Dunia Islam, walaupun telah diadakan pertemuan para menteri penerangan OKI yang pertama di Jeddah (10-14 Oktober 1988), juga di Kairo (15-16 Januari 1992), namun sampai saat ini belum memiliki implikasi yang luas bagi kepentingan tata baru informasi Islam. Padahal soal informasi ini merupakan salah satu aspek terpenting yang harus segera diatasi oleh negara-negara Islam terutama di tengah arus globalisasi informasi dan komunikasi dewasa ini yang cenderung masih didominasi oleh berbagai pemberitaan negara-negara Barat yang sudah tentu memiliki sistem nilai kehidupan tersendiri bila dibanding dengan kebutuhan informasi dunia Islam.[31]

Masalah lainnya yang dihadapi OKI yakni: perlunya dikaji secara kritis, lembaga-lembaga OKI yang fungsional maupun yang tidak fungsional dan dicarikan penyebab ketidak-fungsionalnya tersebut. Perlunya penciutan badan-badan OKI yang begitu membengkak dalam rangka efisiensi (perampingan) agar lebih mudahnya koordinasi dalam pelaksanaan program-program OKI di masa mendatang. Badan IINA (Kantor berita Islam

OKI) perlu segera dikembangkan lebih lanjut secara lebih produktif dan konstruktif, begitu pula dengan keberadaan Mahkamah Islam Internasional, dewan keamanan kolektif negara-negara Islam. Gap antara OKI seperti soal Israel dan Timur Tengah, regionalisasi ekonomi *(Islamic Commom Market)*, pertukaran (exchange) antar negara Islam, soal suplay dari negara-negara non-Muslim, sikap antipati antar sesama anggota OKI, upaya untuk mengikis pengaruh Barat atas beberapa sponsor utama OKI, lebih mengutamakan kepentingan nasional *(national interest)* dan ketergantungan *(dependency)* OKI terhadap Barat (PBB); merupakan beberapa persoalan rumit yang harus segera diselesaikan oleh negara-negara anggota OKI.[32]

Beberapa Bibliografi tentang OKI

1. dr. Abdulhamid 'A. Abu Sulaiman, *The Islamic Theory of International Relation,* Pensylvania University, 1973.
2. dr. Abdulhamid 'A. Abu Sulaiman, *The Islamic Theory of International Relation: New Directions for Islamic Thought and Theology*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Washington DC.
3. Dr. A. Abu Sulaiman, *Politics and Government in Islam,* pada Second International Conference of the World Assembly of Muslim Youth, Riyad, Saudi Arabia, 1973.
4. Dr. Inamullah Khan, 'Organization of the Islamic Conference - OIC', dalam *World Muslim Gazetter*, p. 715-769 (1985) the World Muslim Congress (Motamar Al-Alam Al-Islami).
5. S.S. Pirzada, *The Organization of the Islamic Conference*, OIC General Secretariat, Jeddah, Saudi Arabia, 1988.
6. 'Abdullah al-Ahsan, *OIC, The Organization of the Islamic Conference, An Introduction to an Islamic Political Institution,* The International Institute of Islamic Thought Herndon, Va. USA, 1988.
7. *Indonesia dan Organisasi-Organisasi Internasional,* Direktorat Organisasi-Organisasi Internasional, Departemen Luar Negeri RI, 1991, h.75-86.
8. 'Report and Resolutions Adopted by the Political, Muslim Communities, Minorities, Legal and information Affairs Committee to the Twenty-First Islamic Conference of Foreign Ministers' Karachi, Islamic Republic of Pakistan, 8 Zul Qa'dah 1413 H, (29 April 1993) (Departemen Luar Negeri RI, 1994)
9. *Journal* of Economic Cooperation Among Islamic Countries (Ankara Center, Turki): terbitan Badan Ekonomi OKI.
10. *Arab and Islamic International Directory, guide to International Organization* (ensiklopedi organisasi-organisasi Islam Internasional)
11. OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture, *Newsletter*, Istanbul, Turki.

Catatan:

[1]'Abdullah al-Ahsan, *OIC The Organization of the Islamic Conference, An Introduction to an Islamic Political Institution,* The International Institute of Islamic Thought Herndon, Va. UUSA, 1988, p.11-13.

[2]*Ibid*, p.14-15.

[3]*Ibid*, p.15-16.

[4]*Ibid*, p. 16-18.

[5]*Ibid*, p. 19. Bandingkan dengan: S.S. Pirzada, *The Organisation of the Islamic Conference*, OIC's General Secretariat, Jeddah, 1988, p. 10, 74-81: *Indonesia dan Organisasi-Organisasi Internasional*, Direktorat OI Departemen Luar Negeri RI, 1991, h. 75.

[6]'Abdddullah al-Ahsan, *Ibid*, p. 18.

[7]*Ibid*, p. 23-24; Bandingkan dengan: Inamullah Khan, *World Muslim Gazetter*, The Motamar's Research & Publication Bureau, Pakistan, 1985, p. 715-716; S.S. Pirzada, *Op.cit*, p.10-11.

[8]S.S. Pirzada, *Op.cit*, p.16: Deplu RI, *Op.cit*, h.77: lihat juga, "KTT ke-6 OKI di Dakar, Harapan untuk Rekonsiliasi dan Konsolidasi", *Kompas*, 10 Desember 1991

[9]S.S. Pirzada, *Op.cit*, p.12.

[10]'Abdullah al-Ahsan, *Ibid*, p.18.

[11]20 Tahun OKI, Jalan Terentang Sejak KTT Rabat, *Media Dakwah*, Jakarta, Mei 1990, h.38.

[12] S.S. Pirzada, *Op.cit*, p.18; Deplu RRI, *Op.cit*, h.77 - 78.

[13]Deplu RI, *Op.cit*. h.78; Bandingkan: *Pelita*, Jakarta, 26 April 1993 (1).

[14]Deplu RI, *Op.cit*, h.78.

[15]'Abdullah al-Ahsan, *Op.cit*, p.26-27; S.S. Pirzada, *Op.cit*, p. 19-20.

[16]Deplu RI, *Op.cit*, h.78; S.S. Pirzada, *Op.cit*, p.19.

[17]Deplu RI, *Op.cit*, h.78-79; S.S. Pirzada, *Op.cit*, p. 23; 'Abdullah al-Ahsan, *Op.cit*, p.28.

[18]Deplu RI, *Op.cit*, h. 79-80: S.S. Pirzada, *Op.cit*, p. 24-35: 'Abdullah al-Ahsan, *Op.cit*, p. 28-30.

[19]Sebagai contoh: menurut catatan S.S. Pirzada dalam dokumen OIC di atas (terrrbit 1988), beliau baru mencantumkan 7 Komite Khusus *(Specialized committee)*. Sedangkan menurut catatan yang diterbitkan oleh Deplu RI di atas (1991), *Op.cit*, h. 79-80, telah ada penambahan Komite Khusus dari 7 menjadi 13 Komite.

[20]'Abdullah al-Ahsan, *Op.cit*, p. 30-37; S.S. Pirzada, *Op.cit*, p. 36054; Deplu RI, *Op.cit*, h. 80.

[21]S.S. Pirzada, *op.cit*, p. 55-70; 'Abdulah al-Ahsan, *op.cit*, p. 37-43; Deplu RI, *Op.cit*, h. 80.

[22]S.S. Pirzada, *Op.cit*, p. 82-83; 'Abdullah al-Ahsan, *Op.cit*, p. 135-136; Deplu RI, *Op.cit*, h. 82.

[23]*Ibid*. untuk lebih mengenal negara-negara anggota OKI di atas dapat di lihat: Inamullah Khan, *Op.cit*. p.113-698; juga, harian *Kompas*, tanggal 28-31 Agustus 1992 (tentang data-data negara-negara Non-blok yang sebagian besar di dalamnya tercatat anggota OKI; Iwan Gayo, *Buku Pintar* (Revisi Besar), Edisi ke XV, *Upaya Warga Negara*, Jakarta, 1993, h. 421-596.

[24]Poin no.46-51 merupakan negara anggota baru OKI berdasarkan data dari Deplu RI, 1994. Untuk mengetahui data singkat keenam negara baru OKI, lihat Iwan Gayo, *Op.cit*

[25]Deplu RI, *Op.cit*, h. 81.

[26]*Ibid*. h.86; Bandingkan dengan: *Republika*, 12-10-93 (6) dan *Pelita*. 20 November 1992 (4).

[27]Indonesia termasuk anggota Komisi Internasional Kebudayaan Islam yang dalam hal ini diwakili (dipercayakan) kepada: *Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi* (IAIN Yogyakarta) Deplu RI, *Op.cit*, h.84. Sedangkan untuk Akademi Fiqh Islam Indonesia diwakili oleh Kh. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (almarhum) (lihat: *Pelita*, Juni 1993. Selain itu, Indonesia juga telah terpilih menjadi anggota Dewan Direktur Eksekutif IDB *(Islamic Development Bank)* pada sidang tahunan ke-XII. Juga termasuk dalam Dewan gubernur Bank Islam, di Tunisia tahun 1988. Sebagai anggota *Longer Term Trade Financing Scheme* (LTTFS) sejak Desember 1988, dan Wakil Presiden IDB April 1989. Dalam program pemugaran masjid di Jawa Tengah yang mendapat bantuan Dana Solidaritas Islam (ISF), Indonesia juga dipercayakan sebagai salah satu anggota

Komisi tersebut. *Prof, Dr, Baiquni* juga duduk sebagai anggota Dewan Dana Islam bagi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan (IFSTAD). Wakil Indonesia: *Suhada Ijas,* dipercayakan menjadi wakil Ketua Komisi Bulan Sabit Islam Internassional *(Islamic Commission for the Internasional Crescent*-ICIC) yang berkedudukan di Libya. *Khm Hussein* dari kantor BPKP, mewakili Indonesia menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan OKI. (Lihat: Deplu RI, *Op.cit,* h.84)

[28]Budi Winarno, 'Upaya Barat Menjegal OKI', *Pelita*, tt.; H. Roeslan Abdulgani, 'Pengiriman Tentara OKI ke Bosnia & Trauma Barat', *Suara Merdeka*, 23 Juli 1993 (4); Budi Winarno, 'Cuma Membom Serbia tak akan Menyelamatkan Bosnia', *Republika*, 12 Februari 1994 (6); Budi Winarno, 'Barat, OKI, dan Nasib Bosnia', *Bernas*, 14 Februari 1994 (4); Budi Winarno, 'Barat Mendukung Serbia Mencaplok Bosnia', *Kedaulatan Rakyat*, 18 Februari 1994 (4); Wawancara dengan Dr. Amien Rais, *DETIK*, No. 050 Tahun XVII, 16-22 Februari 1994 (24), 'Pemboman itu hanya *Jeweran.*

[29]Budi Winarno, *Op.cit,*

[30]R. Masri Sareb Putra, 'Prospek Blok Ekonomi Negara-Negara Islam', *Pelita*, 20 November 1992 (4); '10 Negara Asia Tengah Bentuk Blok Ekonomi, Terbesar Kedua Setelah ME', *Bernas*, 30 November 1992; Rudiyanto, 'Alternatif Kerjasama Ekonomi OKI', *Republika*' 12 Oktoberr 1993 (6); '14 Negara OKI Bahas Industri dan Perdagangan', *Republika*, 22 Januarai 1994 (3); 'Kerjasama OKI perlu diperbesar, *Republika*, 22 Januari 1994 (3).

[31]Tentang Media Penerangan OKI; Imam Halilintar; 'RI Bisa Pelopori Realisasi Hasil Konferensi Menpen OKI' *Merdeka*. 21Oktober 1988; 'Konfirmasi Menteri Penerangan Negara Islam, Wahana Mempererat Kerjasama' *Kompas*, 17 Januari 1992 (10). 'Konferensi Menpen OKI Hasilkan Dua Keputusan, *Republika*' 20 Januari 1992 (12).

[32]Lihat Wawancara dengan Dr. Amien rais tentang OKI, *Pelita*, 8 Desember 1991. harian *Republika*, 20 Juni 1993 (OKI dan Kebangkitan Islam).

❋ ❋ ❋